



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Januari 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI PONTIANAK
SUB UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI PONTIANAK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ELIK MURTOPO**
2. Jabatan : **HAKIM AD-HOC**
3. NHK : **524097**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 838.225.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 144 m2/90 m2 di LAMPUNG SELATAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 192.600.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 643 m2/126 m2 di LAMPUNG SELATAN, HIBAH TANPA AKTA Rp. 357.200.000
3. Tanah Seluas 1030 m2 di LAMPUNG SELATAN, WARISAN Rp. 154.500.000
4. Tanah Seluas 92.5 m2 di LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 13.925.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/36 m2 di LAMPUNG SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 90.000.000

1. MOBIL, NISSAN GRAND LIVINA XV M/T Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
2. MOTOR, YAMAHA MIO A/T Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
3. MOTOR, YAMAHA BY8 A/T Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 61.900.000**D. SURAT BERTAGIH** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 194.581.679**F. HARTA LAINNYA** Rp. 99.750.000



Sub Total	Rp.	1.284.456.679
III. HUTANG	Rp.	74.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.210.456.679

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **28 Januari 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.